

PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN KERJA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAAN TERHADAP TENAGA KERJA  
DI PT. X SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

WAHYU DWI BASKORO

NPM. 0971010021

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2013

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN KERJA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN TERHADAP TENAGA KERJA DI  
PT. X SURABAYA

Disusun Oleh :

WAHYU DWI BASKORO  
NPM. 0971010021

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM  
NIP. 19 620625 199103 1001

Mengetahui,  
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM  
NIP. 19 620625 199103 1001

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN

Judul Proposal Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN  
KERJA TERHADAP TENAGA KERJA DI PT.  
CLASSIC PRIMA CARPETS INDUSTRIES  
SURABAYA (Menurut Undang-Undang Nomor  
1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja)

Nama Mahasiswa : WAHYU DWI BASKORO

NPM : 0971010021

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Telah diuji dan diseminarkan pada tanggal 4 April 2013

Pembimbing  
Surabaya, 23 April 2013  
Tim Penguji

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM 1. SUBANI, SH., M.Si  
NIP. 19620625 199103 1 001 NIP. 19510504 1983 031 001

2. FAUZUL ALIWARMAN, SHI., M.Hum  
NPT. 3 8202 07 0221

3. HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM  
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

SUBANI, SH., M.Si  
NIP. 19510504 1983 031 001

## HALAMAN REVISI PROPOSAL PENELITIAN

Judul Proposal Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN  
KERJA TERHADAP TENAGA KERJA DI PT.  
CLASSIC PRIMA CARPETS INDUSTRIES  
SURABAYA (Menurut Undang-Undang Nomor  
1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja)

Nama Mahasiswa : WAHYU DWI BASKORO

NPM : 0971010021

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Telah direvisi pada tanggal 23 April 2013.

Pembimbing

Surabaya, 23 April 2013  
Tim Penguji

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM 1. SUBANI, SH., M.Si  
NIP. 19620625 199103 1 001 NIP. 19510504 1983 031 001

2. FAUZUL ALIWARMAN, SHL., M.Hum  
NPT. 3 8202 07 0221

3. HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM  
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

SUBANI, SH., M.Si  
NIP. 19510504 1983 031 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Tuhan Allah Bapa atas kasih setia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ”PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP TENAGA KERJA DI PT. X SURABAYA”.

Sehubungan dengan selesainya skripsi tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta selaku Dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan memberi banyak hal bagi penulisan Skripsi penelitian ini.
2. Bapak Sutrisno, SH.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. Ec. Gendut Sukarno, MS, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, SH., M.Si., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Sariyanto dan staff tata usaha, terima kasih atas bantuan untuk menyelesaikan Skripsi penelitian ini.
6. Bapak Drs. Eko Budi, selaku Manager Personalia PT, X Surabaya.

7. Bapak Waskito, selaku pembimbing yang telah mengarahkan Skripsi penelitian ini di PT. X Surabaya.
8. Bapak Ahmad Muksoni, selaku pengawas tenaga kerja di Departemen Tenaga Kerja Surabaya.
9. Mas Didik dan Mbak Rini yang telah mendukung perkuliahan ini, baik formil maupun materiil, Tuhan memberkati.
10. Bunda tercinta, terima kasih atas do'a dan motivasinya, Tuhan memberkati.
11. Mas Sahal yang telah memberikan waktu dan tempat untuk membuat Skripsi penelitian ini hingga selesai.
12. Sahabat ku Michael Valentino, Gery, mas Hari, Nia, Elviera terima kasih atas dukungannya selama ini, Tuhan memberkati.
13. Kawan-kawan seangkatan 2009 yang namanya tidak bisa aku sebut semua di dalam penulisan Skripsi penelitian ini.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun diharapkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya,

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN REVISI SKRIPSI .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
Bab I   Pendahuluan .....	1
1.1   Latar Belakang Masalah .....	1
1.2   Rumusan Masalah .....	4
1.3   Tujuan Penelitian .....	5
1.4   Manfaat Penelitian .....	5
1.5   Kajian Pustaka .....	6
1.5.1   Landasan Hukum .....	6
1.5.2   Keselamatan Kerja .....	7
A. Pengertian Keselamatan Kerja .....	7
B. Tujuan Keselamatan Kerja .....	9

1.5.3	Kecelakaan Kerja .....	9
	A. Pengertian Kecelakaan Kerja .....	9
	B. Sebab Kecelakaan Kerja .....	10
	C. Penyakit Akibat Hubungan Kerja .....	16
	D. Alat Pelindung Diri .....	17
	E. Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) .....	17
	F. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja .....	19
1.6	Metode Penelitian .....	22
1.6.1	Jenis Penelitian .....	22
1.6.2	Sumber Data .....	23
1.6.3	Metode Pengumpulan Data .....	25
1.6.4	Metode Analisis Data .....	26
1.6.5	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
1.6.6	Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II</b>	<b>Pelaksanaan Keselamatan Kerja di PT. X Surabaya .....</b>	<b>29</b>
2.1	Gambaran Umum Perusahaan .....	29
2.2	Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja .....	44
2.2.1	Pedoman Perlindungan Keselamatan Kerja di PT. X Surabaya .....	44
2.2.2	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).....	46



2.2.3 Usaha-usaha Pencegahan Kecelakaan Kerja .....	47
BAB III Upaya Hukum Yang Dilakukan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja di PT. X Surabaya .....	51
3.1 Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja .....	51
3.2 Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Keselamatan Kerja ....	56
3.2.1 Pendidikan dan Pelatihan .....	56
3.2.2 Standarisasi .....	56
3.2.3 Pemberian Santunan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja .....	57
3.2.4 Prosedur Keadaan Darurat .....	58
3.2.5 Upaya Hukum .....	59
BAB IV PENUTUP .....	60
4.1 Kesimpulan .....	60
4.2 Saran .....	61

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Job Description .....	35
Tabel 3.1 Data Kecelakaan Kerja 2012 – 2013 .....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi PT. X Surabaya .....	34
------------	--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Wawancara Dengan Personalia PT. X Surabaya
Lampiran 2	Wawancara Dengan Tenaga Kerja PT. X Surabaya
Lampiran 3	Wawancara Dengan Dinas Tenaga Kerja Surabaya
Lampiran 4	Formulir Pendaftaran Tenaga Kerja di PT. Jamsostek
Lampiran 5	Bentuk KK2 PT. Jamsostek
Lampiran 6	Bentuk KK3 PT. Jamsostek
Lampiran 7	Bentuk KK4 PT. Jamsostek
Lampiran 8	Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 9	Surat Penelitian PT. X Surabaya
Lampiran 10	Surat Penelitian Dinas Tenaga Kerja Surabaya

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Fakultas Hukum

Nama Mahasiswa : Wahyu Dwi Baskoro  
NPM : 0971010021  
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 25 Januari 1990  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :  
PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN KERJA MENURUT  
UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN TERHADAP TENAGA KERJA DI PT. X  
SURABAYA.

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum keselamatan kerja menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja di PT. X Surabaya dan upaya hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT. X Surabaya. Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dimana metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja disebabkan kurangnya konsentrasi pekerja pada saat melaksanakan pekerjaannya dan tidak memakai alat pelindung diri yang diberikan oleh perusahaan. Sistem manajemen PT. X Surabaya menerapkan sistem manajemen yang terbuka bagi seluruh pekerja, maka seluruh pekerja mempunyai kesempatan yang sama dalam bekerja, berprestasi dan berkarir tanpa, membedakan suku, agama maupun kebangsaan. Tindakan pencegahan kecelakaan kerja yang dilakukan PT. X Surabaya antara lain dengan mengadakan seleksi calon tenaga kerja baru, menerapkan disiplin kerja, pengadaan gambar/foto di daerah yang berbahaya dan instruksi kerja yang dilakukan oleh kepala bagian di unit masing-masing departemen.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, tenaga kerja, keselamatan kerja.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan beberapa faktor yang menunjang seperti faktor modal, alam dan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dari ketiga faktor tersebut, faktor tenaga kerja merupakan peranan yang tidak kalah pentingnya dibanding faktor penunjang lainnya.

Hal ini didukung oleh jumlah penduduk yang sangat besar, merupakan salah satu modal yang sangat penting mengingat faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan ini harus diperhatikan, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan yang berkaitan dengan yang dilakukannya.

Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja (perusahaan). Tempat kerja adalah setiap tempat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) unsur yaitu :<sup>1</sup>

1. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial
2. Adanya sumber bahaya
3. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus menerus maupun hanya sewaktu-waktu.

---

<sup>1</sup>Sendjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Rineka Cipta. Jakarta 1995, h. 83

Sebelum suatu tindakan penanggulangan yang tepat terhadap kecelakaan dapat diambil, perlu diketahui dengan jelas bagaimana dan mengapa kecelakaan itu bisa terjadi. Keterangan lengkap harus diperoleh melalui penyelidikan secara hati-hati terhadap setiap kasus, setiap kecelakaan, sampai-sampai yang terkecilpun harus diselidiki.

Marilah kita ambil sebuah contoh untuk menjelaskan hal tersebut di atas. Misalkan seorang memanjat tangga dan jatuh karena terdapat anak tangga yang hilang. Penyelidikan dapat mengungkapkan sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Ada sebuah tangga dengan anak tangga yang hilang di ruang kerja
- b. Seorang pekerja mengambil tangga itu dan memakainya untuk suatu perbaikan kecil, dan;
- c. Setelah menyelesaikan pekerjaan, ia menuruni tangga dan lupa bahwa ada anak tangga yang hilang.

Masing-masing dari ketiga faktor itu diperlukan untuk dapat menjelaskan situasi yang menyebabkan kecelakaan, tetapi kecelakaan itu sendiri hanya akan terjadi bila ketiganya dikombinasikan bersama. Bila salah satu saja dan faktor-faktor tersebut di atas dapat dihilangkan, maka kecelakaan itu tidak akan terjadi. Untuk dapat memilih faktor mana yang harus diawasi sebagai penyebab kecelakaan, maka kita perlu berhati-hati agar faktor yang kita pilih tersebut merupakan sesuatu yang benar-benar dapat mencegah terulangnya kecelakaan tersebut. Hanya cara ini yang dapat memberikan hasil praktis dalam upaya pencegahan kecelakaan.

---

<sup>2</sup> Andreas Sewadi, Pencegahan Kecelakaan, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1989, h. 38

Disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku untuk mencapai tujuan pembangunan sejalan dengan itu, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta untuk melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Dalam Pasal 1337 KUH Perdata membatasi isi perjanjian kerja yaitu tidak boleh bertentangan dengan:<sup>3</sup>

- a. Undang-undang
- b. Kesusilaan
- c. Ketertiban umum

Dengan adanya perjanjian kerja yang sesuai dengan ketentuan diatas, diberikan jaminan serta perlindungan bagi pekerja sehingga terwujud keseimbangan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban antara tenaga kerja dan pengusaha dalam suatu hubungan kerja.

Sedangkan pengertian tenaga kerja dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003, pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Definisi kesehatan kerja adalah aplikasi kesehatan masyarakat dalam suatu tempat kerja (perusahaan, pabrik, kantor dan sebagainya) dan yang menjadi pasien dari kesehatan kerja ialah masyarakat pekerja dan masyarakat

---

<sup>3</sup> Lanny Ramli, "Perjanjian Kerja Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dan Pengusaha", Yuridika Volume 16 Nomor 2 Tahun 2001, h. 176



sekitar perusahaan tersebut. Apabila didalam kesehatan masyarakat ciri pokoknya adalah upaya preventif (pencegahan penyakit) dan promotif (peningkatan kesehatan) maka kedua hal tersebut juga menjadi ciri pokok dalam kesehatan kerja.<sup>4</sup>

Upaya pencegahan agar kecelakaan kerja tidak terjadi dan sekaligus juga menghindari kemungkinan terulangnya bencana tersebut harus senantiasa dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan kerja akan dapat dikendalikan. Turun atau kecilnya angka kecelakaan kerja pada suatu perusahaan tidak saja akan menaikkan angka produktifitas tetapi juga akan menimbulkan rasa aman dan gairah kerja pada tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya.

Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja di PT. X Surabaya”

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi masalah di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan keselamatan kerja di PT. X Surabaya menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

---

<sup>4</sup> Soekidjo Notoatmodjo, Kesehatan Masyarakat Ilmu Dan Seni, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h.198

2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan kerja bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT. X Surabaya?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui gambaran tentang pelaksanaan keselamatan kerja serta upaya hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT. X Surabaya.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik teoritis maupun secara praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai perlindungan hukum keselamatan kerja yang dilaksanakan oleh PT. X Surabaya. Penelitian ini diharapkan pula dapat berguna bagi peneliti berikutnya, bagi akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur serta masyarakat yang bekerja di suatu perusahaan.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi instansi

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan tambahan informasi dalam menyusun dan meningkatkan usaha perlindungan hukum keselamatan kerja.

b. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang hukum dan keselamatan kerja, serta sebagai data untuk penelitian lebih lanjut.

c. Bagi Fakultas

Semoga dapat memberikan masukan dalam bidang sejenis untuk penelitian lebih lanjut serta dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

## 1.5. Kajian Pustaka

### 1.5.1. Landasan Hukum

Dasar hukum penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di setiap tempat atau perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja adalah:

1. Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja dicantumkan bahwa:

“untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja, Undang-undang No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menetapkan perlunya pengaturan mengenai penyakit yang timbul karena hubungan kerja”

2. Pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menjelaskan bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja menjelaskan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktifitas nasional.
- b. Bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya.
- c. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien.

4. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 yang menyatakan bahwa:

“Tiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas”:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

### 1.5.2. Keselamatan kerja

#### A. Pengertian Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan serta cara-caranya melakukan pekerjaan.<sup>5</sup> Berdasarkan Menurut Dinas Tenaga Kerja Surabaya, keselamatan kerja adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan atau keamanan dalam bekerja, dalam hal ini adalah pekerja, alat, bahan dan lingkungan kerja.<sup>6</sup>

Kecelakaan kerja tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya, oleh karena itu kecelakaan dapat dicegah, asal kita cukup kemauan untuk mencegahnya. Oleh karena itu pula sebab-sebab kecelakaan harus diteliti dan ditemukan agar untuk selanjutnya dengan usaha-usaha koreksi yang ditujukan kepada sebab itu kecelakaan dapat dicegah dan tidak terulang kembali.<sup>7</sup>

Aturan yang diterapkan oleh dinas tenaga kerja berpacu pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Mengenai peraturan keselamatan kerja dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 86 dan 87 yaitu:

---

<sup>5</sup> Suma'mur, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, Haji Masagung, Jakarta, 1996 (selanjutnya disingkat Suma'mur 1), h.1

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ahmad Muksoni, Pengawas Dinas Tenaga Kerja Surabaya, 7 Juni 2013

<sup>7</sup> Suma'mur, Higiene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja, Haji Masagung, Jakarta, 1996 (selanjutnya disingkat Suma'mur 2), h.212

1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
  - a. Keselamatan dan kesehatan kerja
  - b. Moral dan kesusilaan
  - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.<sup>8</sup>

Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang meliputi:

1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau
2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu

#### B. Tujuan Keselamatan Kerja

Tujuan keselamatan kerja adalah untuk melindungi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaannya

---

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Ahmad Muksoni, Pengawas Dinas Tenaga Kerja Surabaya, 7 Juni 2013

untuk kesejahteraan hidup, meningkatkan produksi serta produktifitas nasional, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja dan melindungi sumber produksi agar dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.<sup>9</sup>

### 1.5.3. Kecelakaan Kerja

#### A. Pengertian Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan kerja di perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti bahwa kecelakaan kerja terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan. Kadang-kadang kecelakaan akibat kerja diperluas ruang lingkupnya, sehingga meliputi juga kecelakaan tenaga kerja yang terjadi pada saat perjalanan dan dari tempat kerja.<sup>10</sup> Kecelakaan kerja dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena adanya sumber bahaya atau bahaya kerja
- b. Kecelakaan perjalanan adalah kecelakaan yang terjadi diluar tempat kerja dalam kaitannya dengan adanya hubungan kerja.

Berdasarkan kategori diatas dijelaskan bahwa usaha pencegahan kecelakaan hanya dapat berhasil apabila dimulai dari memperbaiki manajemen tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Praktek dibawah standar dan kondisi dibawah standar hanya

---

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Waskito, Supervisor Bagian Umum PT. X Surabaya, 4 Maret 2013

<sup>10</sup> Suma'mur 1, Op.cit, h.5

merupakan penyebab seketika suatu kecelakaan, merupakan gejala dari penyebab utama akibat kesalahan manajemen.

#### B. Sebab Kecelakaan Kerja

Kegiatan pencegahan kecelakaan internasional tidak berkembang secara luas sampai hampir seabad setelah mulainya kegiatan nasional, kegiatan ini mengikuti pola perkembangan nasional tapi dalam banyak hal masih sangat tidak lengkap.

Untuk analisa sebab-sebab kecelakaan akibat kerja hanya ada 2 golongan penyebab. Golongan pertama adalah faktor mekanis dan lingkungan, yang meliputi segala sesuatu selain manusia, golongan kedua adalah manusia itu sendiri yang merupakan sebab kecelakaan. Contoh analisa sebagai berikut :

Seorang pekerja mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh kejatuhan benda tepat mengenai kepalanya, sesungguhnya dia tidak harus mendapat kecelakaan itu, seandainya dia mengikuti petunjuk untuk tidak berjalan dibawah alat angkat barang, jadi sebabnya dalam hal ini adalah faktor manusia.<sup>11</sup>

Penyebab dasar adalah hal-hal yang mengakibatkan atau mendorong penyebab langsung. Penyebab dasar dibedakan dalam 2 kategori, yaitu :

---

<sup>11</sup> Suma'mur 2, Loc.cit, h. 212



#### a. Faktor Personal

Faktor personal adalah faktor di dalam diri pekerja/korban yang mendorong dirinya untuk melakukan tindakan tidak aman. Contohnya adalah usia, tingkat pendidikan, dan perilaku.<sup>12</sup>

##### 1. Usia

Usia mempunyai pengaruh yang penting terhadap kejadian kecelakaan kerja. Golongan umur tua mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami kecelakaan akibat kerja dibandingkan dengan golongan umur muda. Hal ini dikarenakan umur muda mempunyai reaksi dan kegesitan yang lebih tinggi, namun umur muda pun sering pula mengalami kasus kecelakaan kerja, hal ini mungkin karena kecerobohan dan sikap suka tergesa-gesa dalam menjalankan pekerjaan.

##### 2. Tingkat pendidikan

Pendidikan seseorang berpengaruh dalam pola pikir seseorang dalam menghadapi pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, selain itu pendidikan juga akan mempengaruhi tingkat penyerapan terhadap pelatihan yang diberikan dalam rangka melaksanakan pekerjaan dan keselamatan kerja.

---

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Waskito, Staf Personalia PT. X Surabaya, 4 Maret 2013

### 3. Perilaku

Revolusi industri mengakibatkan terjadinya peningkatan teknologi dan permesinan yang modern. Di satu sisi akan sangat menguntungkan untuk meningkatkan produksi yang berkualitas dan keuntungan perusahaan, namun di sisi lain potensi terjadinya kecelakaan semakin meningkat, apalagi jika SDM dan perilaku pekerja tidak siap.

Semakin menyadari bahwa banyak kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja berhubungan langsung dengan faktor-faktor manusia yaitu kecelakaan itu terjadi lebih karena perilaku ketimbang kegagalan mekanis atau kelemahan sistem kerja.<sup>13</sup> Dalam menghadapi proses kerja atau teknologi yang tinggi membutuhkan penyesuaian sikap dan perilaku pekerja yang aman dan handal. Walaupun tidak mudah, mau tidak mau harus dilakukan secara baik dan berlanjut.

#### b. Faktor Pekerjaan

Salah satu bentuk faktor pekerjaan adalah shift kerja, jenis pekerjaan, lama jam kerja dan faktor lingkungan yang meliputi:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> John Ridley, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, Erlangga, Edisi Ketiga, Jakarta, 2006, h.77

<sup>14</sup> Andreas Sewadi, Op.cit, h. 142

### 1. Giliran kerja (Shift)

Giliran kerja adalah pembagian kerja dalam waktu dua puluh empat jam. Terdapat dua masalah utama pada pekerja yang bekerja bergiliran yaitu : ketidakmampuan pekerja untuk beradaptasi dengan sistem shift dan ketidakmampuan pekerja untuk beradaptasi dengan kerja pada malam hari dan tidur pada siang hari. Pergeseran waktu kerja dari pagi, siang dan malam hari dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan kecelakaan akibat kerja.

### 2. Jenis (Unit) Pekerjaan

Jenis pekerjaan mempunyai pengaruh besar terhadap resiko terjadinya kecelakaan akibat kerja. Jumlah dan macam kecelakaan akibat kerja berbeda-beda di berbagai kesatuan operasi dalam suatu proses.

### 3. Lama Jam Kerja

Lamanya jam kerja juga mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Jika jam kerja lama maka resiko kecelakaan juga semakin tinggi. Disamping lama jam kerja juga memicu timbulnya faktor psikologis, misalnya jenuh, stress dan sebagainya.

Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang meliputi:

1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau
2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu

#### 4. Faktor Lingkungan

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di sekitar tenaga kerja dan pekerjaannya. Faktor mekanis dan lingkungan dapat pula dibagi – bagi menurut keperluan untuk maksud apa. Misalnya di perusahaan – perusahaan sebab – sebab kecelakaan dapat disusun menurut pengolahan bahan, mesin penggerak dan pengangkat, jatuh di lantai dan tertimpa benda jatuh, pemakaian alat atau perkakas yang dipegang dengan tangan, menginjak atau terbentur barang, luka – luka bakar oleh benda pijar, dan pengangkutan.<sup>15</sup>

Dalam bekerja diperlukan adanya kondisi lingkungan kerja yang nyaman bagi tenaga kerja. Lingkungan kerja yang memadai, lestari dan manusiawi akan menunjang kegairahan dan efisiensi kerja, sedangkan lingkungan kerja yang

---

<sup>15</sup> Suma'mur 2, Op.cit, h. 212

kondisinya melebihi kemampuan manusia untuk menghadapinya tidak hanya merugikan produktivitas, tetapi juga akan menjadi malapetaka bagi manusia.

Faktor yang ada di lingkungan yang dapat menimbulkan masalah pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja yaitu :<sup>16</sup>

- a. Faktor fisik yang meliputi pencahayaan, radiasi, suhu udara, kelembaban, kebisingan dan tekanan udara.
- b. Faktor kimia yang meliputi debu, gas, uap, kabut, cairan dan asap.
- c. Faktor biologis baik berasal dari tumbuhan maupun binatang, misalnya bakteri, virus, jamur, serangga, dan lain-lain.
- d. Faktor fisiologis seperti konstruksi mesin, sikap dan cara kerja.
- e. Faktor mental psikologis misalnya hubungan kerja antara karyawan dengan atasan yang kurang baik, suasana/pekerjaan yang membosankan dan lain-lain.

Kelima faktor di atas dalam jumlah yang cukup dapat mengganggu daya kerja seorang tenaga kerja dan mempengaruhi produksinya. Pengendalian faktor lingkungan guna menciptakan kenyamanan kerja sangat penting dan

---

<sup>16</sup> Suma'mur 2, Op.cit, h.49

perlu diperhatikan oleh perusahaan, oleh karenanya proses pembinaan dalam usaha K3 harus ditanamkan sedini mungkin bagi tenaga kerja dan hendaknya selalu diusahakan terus-menerus sepanjang kehidupan.

### C. Penyakit Akibat Hubungan Kerja

Pada simposium internasional mengenai penyakit akibat hubungan pekerjaan yang diselenggarakan oleh ILO di Linz Austria dihasilkan definisi sebagai berikut:<sup>17</sup>

#### 1. Penyakit akibat kerja (Occupational disease)

Adalah penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan yang pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui.

#### 2. Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan (Work related disease)

Adalah penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab, dimana faktor pada pekerjaan memegang peranan bersama dengan faktor resiko lainnya dalam berkembangnya penyakit yang mempunyai etiologi yang kompleks.

#### 3. Penyakit yang mempunyai populasi pekerja (Disease of fecting working populations)

---

<sup>17</sup> Tjandra Yoga Aditama, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, UI:Press, Jakarta, 2010, h.66

Penyakit yang terjadi pada populasi pekerja tanpa adanya agen penyebab di tempat kerja, namun dapat diperberat oleh kondisi pekerjaan yang buruk bagi kesehatan.

#### D. Alat Pelindung Diri

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan alternatif terakhir apabila pengendalian terhadap lingkungan kerja yang lain tidak dapat atau sulit dilakukan. Alat pelindung diri agar dapat memberikan fungsi yang optimal maka harus dipilih dengan ketentuan :

1. Memberikan perlindungan yang kuat pada pekerja
2. Ringan dan nyaman
3. Dapat dipakai secara fleksibel
4. Bentuknya menarik
5. Awet dan tidak mudah rusak
6. Tidak menimbulkan bahaya tambahan
7. Memenuhi standar

#### E. Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Usaha kesehatan kerja memerlukan partisipasi dan kerjasama dari semua pihak yaitu pemerintah, pengusaha dan buruh. Bentuk partisipasi yang memenuhi dasar pemikiran ialah partisipasi langsung dalam panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Partisipasi berdasarkan

kesetiakawanan (partnership) merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan efisiensi kerja.<sup>18</sup>

Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.<sup>19</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek, Pasal 1, Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Program jaminan sosial tenaga kerja menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek, Pasal 6 menyebutkan ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja
- b. Jaminan Kematian
- c. Jaminan Hari Tua
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

---

<sup>18</sup> Hariyo Sulistiyantoro, "Jaminan Kesehatan Kerja Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Buruh Wanita di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2010, h.1

<sup>19</sup> Sendjun H Manulang, Op.cit, h. 89



Menurut Sendjun H. Manulang, Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah jaminan yang menjadi hak tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa uang, pelayanan dan pengobatan yang merupakan pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, meninggal dunia dan mengganggur.

Oleh karena jangkauan program jaminan sosial tenaga kerja sangat luas, maka penyelenggaraannya dilakukan secara bertahap. Dengan sendirinya bagi perusahaan yang belum menjadi peserta asuransi jaminan sosial tenaga kerja, jaminan-jaminan tersebut tetap menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri.<sup>20</sup>

#### F. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja

Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkup perlindungan terhadap pekerja menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan meliputi:

- a. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Perlindungan atas moral dan kesusilaan

---

<sup>20</sup> Sendjun H. Manulang, Op.cit, h.131

- c. Pelakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Di dalam KUH Perdata Bab VII A Buku III KUH Perdata Pasal 1602-1603 mengatur tentang pelaksanaan kerja dalam ikatan hubungan kerja antara karyawan dan pengusaha dalam hal sangkut pautnya dengan perjanjian kerja.

Ada beberapa hak-hak tenaga kerja di tempat kerja atau perusahaan sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Meminta kepada Pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan di tempat kerja/perusahaan yang bersangkutan.
2. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat pelindung diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dalam hal khusus ditetapkan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>21</sup> Ibid, h. 86

Perlindungan tenaga kerja ini menyangkut berbagai aspek seperti jaminan sosial, jam kerja, upah minimum, hak berserikat dan berkumpul dan yang tidak kalah pentingnya adalah perlindungan keselamatannya. Namun dalam kenyataannya, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sering diabaikan, khususnya oleh mereka yang cenderung mencari keuntungan semata. Jika pekerja celaka atau tidak mampu bekerja tinggal mencari pengganti dengan pekerja baru. Karena itulah diperlukan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>22</sup>

Selain perlindungan terhadap pekerjaanya, terdapat jenis perlindungan lain, yaitu:

a. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Program Jamsostek pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang menurut Pasal 1 ayat (1) Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Program Jamsostek merupakan kelanjutan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) yang didirikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977.

---

<sup>22</sup> Soehatman Ramli, Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Dian Rakyat, Jakarta, 2010, h. 14

b. Perlindungan keselamatan dan kesehatan

Perlindungan keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

c. Perlindungan upah

Perlindungan upah merupakan aspek perlindungan yang paling penting bagi tenaga kerja. Bentuk perlindungan pengupahan merupakan tujuan dari pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupannya bersama dengan keluarganya, yaitu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selama pekerja/buruh melakukan pekerjaannya, ia berhak atas pengupahan yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya. Selama itu memang majikan wajib membayar upah itu.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terdiri dari:<sup>23</sup>

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum
- b. Penelitian terhadap efektifitas hukum

Paham-paham empiris dalam arti tertentu memandang proposisi bersifat meramalkan (predictive) atau hipotesis dan memandang kebenaran proposisi sebagai terpenuhinya ramalan-ramalan itu.<sup>24</sup>

Dikonsepkan sebagai gejala empiris yang teramati di alam pengalaman, hukum tidak lagi dimaknakan sebagai kaidah-kaidah normatif yang eksistensinya berada secara eksklusif di dalam suatu system legitimasi yang formal.

Dari aspek substansinya, kini hukum lebih terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang lahir secara sah sebagai produk lembaga kelengkapan Negara yang sah dan bekerja dengan hasil yang mungkin efektif atau mungkin juga tidak untuk memola perilaku-perilaku aktual warga masyarakat.<sup>25</sup>

Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian non doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, h.42

<sup>24</sup> Ibid, h.18

<sup>25</sup> Ibid, h.75

mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum keselamatan kerja terhadap tenaga kerja serta upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan kerja di PT. X Surabaya. Pendekatan dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang berupa wawancara dan observasi yang kemudian disebut sebagai data primer.

#### 1.6.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

##### 1. Data Primer

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer.<sup>27</sup> Teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data yang dalam hal ini adalah tentang perlindungan hukum keselamatan kerja terhadap tenaga kerja di PT. X Surabaya adalah wawancara dan observasi.

---

<sup>26</sup> Ibid, h.42

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 12

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun maksudnya adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan permasalahan yang dibahas terdiri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja.
- 3) Batang tubuh Undang-undang Dasar 1945
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

b. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, Op.cit, h. 113

sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>29</sup>

### 1.6.3. Metode Pengumpulan Data

#### 1. Kepustakaan

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat diperoleh melalui penelitian kepustakaan mencari, mempelajari dan memahami buku-buku literatur hukum. Selain itu juga mengumpulkan bahan-bahan hukum perundang-undangan yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini untuk dipelajari dan diteliti.

#### 2. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan melalui proses wawancara dengan management dan tenaga kerja yang dilakukan di PT. X Surabaya, pihak Disnaker kota Surabaya dan para pihak yang mengerti akan keselamatan kerja.

#### 3. Observasi

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan metode observasi yang mana tidak keseluruhan dapat menimbulkan suatu kasus atau peristiwa hukum. Tujuannya untuk mendapatkan data menyeluruh dari pelaksanaan keselamatan kerja.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, Op.cit, h.13



#### 1.6.4. Metode Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah analisis data. Pada tahap ini data yang dikumpulkan akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan.

Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila:<sup>30</sup>

1. Data yang terkumpul tidak berupa angka – angka yang dapat dilakukan pengukuran.
2. Data tersebut sukar diukur dengan angka.
3. Hubungan antara variabel tidak jelas.
4. Sampel lebih bersifat non probabilitas.
5. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.
6. Penggunaan – penggunaan teori kurang diperlukan.

Untuk menganalisa data yang bersifat kualitatif ini, maka peneliti mempergunakan analisa kualitatif yaitu data diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan deskriptif tentang perlindungan hukum keselamatan kerja terhadap tenaga kerja di PT. X Surabaya.

---

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.77

#### 1.6.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. X yang beralamat di Rungkut Industri Surabaya. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-April 2013

#### 1.6.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini merupakan suatu kesatuan pemikiran secara utuh dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Skripsi ini disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Pendahuluan berisi uraian atau gambaran mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam bab I ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan tentang rumusan masalah yang pertama mengenai pelaksanaan keselamatan kerja di PT. X Surabaya. Dalam bab II ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu sub bab pertama mengenai tugas dan tanggung jawab Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam meningkatkan keselamatan kerja dan sub bab yang kedua mengenai pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja.

Bab III membahas tentang rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai bagaimana upaya hukum yang dilakukan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT. X Surabaya. Dalam bab III ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu sub bab pertama mengenai prosedur penanganan kecelakaan kerja dan sub bab yang kedua mengenai upaya hukum dalam meningkatkan keselamatan kerja.

Bab IV merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya dan kemudian memberikan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.